



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor 30 Tahun 1984
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN
PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN DAERAH TING
KAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANGI

1. Bahwa didalam ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1975 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor - HK.I/37/77 tanggal 9 Mei 1977 tentang Pelaksanaan Pelelangan Ikan di Jawa Timur, dimana mengenai masalah yang menyangkut Pedoman Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pelelangan Ikan masih belum diatur secara lebih terperinci ;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan guna mengintensifkan pembinaan, bimbingan serta pengawasan terhadap tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pelelangan Ikan - dimaksud, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK.I/37/77, tanggal 9 Mei 1977 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 297 tahun 1983, tanggal 26 Desember 1983.

M E M U T U S K A N

MENERAPKAN,
PERTAMA

1. Pungutan biaya penyelenggaraan pelelangan sebesar 2 % (dua prosen) dari harga kotor setiap transaksi jual beli oleh penyelenggara pelelangan ikan yang dibebankan kepada pihak - penjual sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1975, setelah dijadikan 100 % (seratus prosen) penggunaannya diperinci sebagai berikut :

- a. Sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan pelelangan ikan dan pengeluaran lainnya;
- b. Sebesar 20 % (dua puluh persen) dipergunakan untuk dana kerja jakeran/asuransi para nelayan/petani ikan;
- c. Sebesar 5 % (lima persen) dipergunakan untuk subsidi kepada induk Organisasi Penyelenggara Pelelangan Ikan (KUPI).

III. Setelah dijadiakan 100 % (seratus persen) pengembangannya di-
 besar 75 % (tujuh puluh lima persen) pada huruf a dikuriri PERKHA-
 berturut sebagai berikut :

- a. Sebesar 60 % (enam puluh persen) dipergunakan untuk gaji/ upah pegawai pelelangan ikan setempat ;
- b. Sebesar 20 % (dua puluh persen) dipergunakan untuk ongkos- ongkos Kantor tempat Pelelangan Ikan ;

c. Sebesar 10 % (sepuluh persen) dipergunakan untuk dana taktis operasional bagi Panitia Tempat Pelelangan Ikan (KUPI) di ka-
 bupaten Daerah Tingkat II Lamongan, disetor melalui Dinas Pe-
 rilikutan Kabupaten Lamongan ;

d. Sebesar 10 % (sepuluh persen) dipergunakan untuk bantuan da-
 ur pembangunan Desa setempat dalam kawasan/radius Tempat Pe-
 lelangan Ikan.

KEMIGA

: Kelebihan keuangan dari biaya penyelenggaraan pelelangan ikan
 menjadi milik penyelenggara dan semua kerugian dalam penyeleng-
 garan pelelangan ikan tersebut menjadi tanggungan jawab penyeleng-
 gara.

KEMPAT

(2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
 5 tahun 1975, dan kepada Administrator IPI Labuhan, IPI Bron-
 dong, IPI Kandi, IPI Wera, IPI Doyo dan IPI Blora, wajib me-
 laporkan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan pelaksanaan ke-
 lantan pelelangan ikan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
 dan II Lamongan. Dalam pelaksanaan Kabupaten Lamongan secara-
 berkala setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan bert-
 kutnya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal

: 1 Maret 1984



BUPATI KAPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRDJO

NIK H. 6617/D

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
- 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- 6. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan ;
- 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- 8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- 9. Sdr. Pembantu Bupati Paciran, Lamongan, Karangbinangun ;
- 10. Sdr. Camat Deket, Camat Karangbinangun, Camat Glagah, Camat Paciran, Camat Brondong ;
- 11. Sdr. Ketua Penyelenggara TPI Labuhan, TPI Brondong, TPI Kranji, TPI Wera, TPI Dinoyo dan TPI Blawi.